

Menatap Tahun Baru, Tantangan dan harapan

Oleh : Gatut Priyowidodo, Ph.D

Bila harus memilih hidup itu sebuah kepastian atau ketidakpastian? Tiga perkara yang kerap dikutip sebagai kepastian yakni tua, sakit dan kematian. Dan tiga perkara yang kita tidak tahu yakni rezeki, umur dan jodoh. Cukupkah? Ternyata tidak. Bagi mereka yang menekuni dunia bisnis, kegagalan juga sebuah kepastian. Tanya kepada trader atau piutang saham, loss atau kerugian juga sebuah kepastian. Langkah dan berujung celaka juga kepastian. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di sisi barat juga kepastian. Dosa pun adalah kepastian. Serta masih banyak lagi.

Kepastian adalah tercerabutnya atribut ketidakpastian karena minimnya pilihan. Apa yang hendak bisa dikatakan, jika dihadapkan pada dua pilihan, yang satu sudah hilang dan satunya tersisa? Pasti yang dipilih adalah yang tersisa. Atau menurut Francis Bacon, filosof Inggris (1561-1626), *if a man will begin with certainties, he shall end in doubts, but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties.* (Bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang mulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian).

Tahun baru ini kita mulai dengan kepastian atau keraguan, dengan banyak pilihan atau sedikit pilihan? Ternyata menjawab pertanyaan bergaya bahasa *apofisis/preterisio* (adaunsur kontradiksi), seperti itu tidak mudah. Fenomena sosial bergerak dalam irama tidak beraturan yang sulit diprediksi.

Statistik yang konon bisa memberi akurasi paling sahih atas kesimpulan akhir, ternyata dihadapkan pada hasil pilpres di AS 8 November lalu, juga sama sekali tak berdaya. Semua hasil polling pra pemilihan mengunggulkan Hillary Clinton, ternyata pada hasil akhir dimenangkan Donald Trump.

Menatap 12 bulan ke depan, tentu tidak semua aspek bisa ditelisik secara cermat. Baiklah kita mencoba memahami dua aspek dari Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK dalam konteks toleransi kehidupan beragama.

Menolak Negara Lemah

Bertubi-tubi negara yang sudah membaik dalam konsolidasi kekuatan politik dan ekonomi, coba dilemahkan oleh anasir kekuatan rakyat yang tidak mau melihat Indonesia rajat.

Peta permasalahan bangsa belum ditempatkan sebagai satu kesepakatan musuh bersama untuk diperangi. Korupsi dan kemiskinan seolah bisa selesai dengan hati dan pikiran yang tenang, benarkah perkara pengutipan sebuah surat dari kitab suci agama Islam oleh seorang penganut agama

lain, menjadi masalah yang begitu menghebohkan. Perlu dicatat yang dikutip adalah makna atau interpretasi sebuah teks.

Taruhlah disepakati, bahwa itu tidak boleh. Karena tidak tahu, tentu sudah bijak bila kemudian minta maaf dan dimaafkan. Selesai masalah. Ternyata tidak. Letupan emosi dikonsolidasi melalui gerakan aksi yang ujung-ujungnya bermuara agar si BTP yang gubernur DKI non aktif, secara legal formal digiring hingga bersatus terdakwa dan dipenjarakan.

Terhadap gerakan massa Bela Islam 1 dan 2 yang begitu massif yang mengawal keputusan sebuah ormas (MUI adalah ormas), sangat terkesan bila gelora Nawa Cita keempat, negara tidak boleh lemah ternyata lemah. Negara demi seolah memperhatikan kepentingan yang lebih besar misalnya timbul *chaos*, alternatif memenuhi tuntutan massa menjadi yang lebih baik.

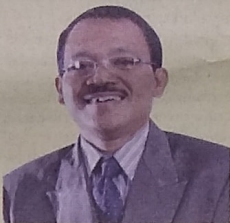
Kekuatan infrastruktur politik yang direpresentasi aksi ormas seakan mendegradasi kekuatan suprastruktur politik demi sebuah penitaraan. Lembaga eksekutif, melalui aparatus negaranya 'bermain cantik' menghindari *clash fisik*, tetapi intinya justru menciderai spirit negara tidak boleh lemah.

Davidheiser (1992) dalam artikelnya yang berjudul, *Strong States, Weak States. The Role of the State in Revolution*, menulis bahwa negara kuat atau negara tidak lemah harus memenuhi tiga kriteria yakni kedalaman penetrasi masyarakat oleh lembaga kebijakan, luasnya penetrasi masyarakat oleh lembaga kebijakan, dan penetrasi negara oleh masyarakat. Sepanjang pada tiga hal tersebut pengaruh negara masih kuat terasa, berarti negara kuat itu ada eksistensinya. Manakala pengaruhnya justru berkebalikan maka negara kuat sekekar gelegar tapi tanpa taji.

Mempertontonkan cara-cara kompromis demi keengganan mengambil tindakan yang beresiko jelas secara ekonomi sangat menguntungkan karena *low cost*. Tetapi secara politik, telah mengabaikan hak lindung yang semestinya negara berikan kepada mereka yang dalam tataran sosial, hukum, kuantitas dan politik amat kecil, lemah dan minoritas.

Bagi kelompok yang terpinggirkan seperti itu, kehadiran negara tidak cukup secara retorik digemakan dalam pidato formal tetapi secara faktual harus bisa dirasakan langsung. Bila atas nama HAM kemudian aparat keamanan seolah melakukan pembiaran terhadap mereka yang sedang beribadah (apapun itu agamanya), tentu persepsi negara diskriminatif dan tidak netral semakin jelas.

Posisi negara kuat dan demokratis harus dilembagakan dalam sebuah sistem politik yang mengayomi



dan melindungi keragaman warganya dalam seluruh aspek. Secara material, Indonesia telah memiliki semua. Konstitusi sangat akomodatif, aturan-aturan baik pada level UU ataupun PP dan Perpres sangat kondusif. Beberapa aturan selevel SKB Tiga Menteri dan Perda yang diskriminatif memang perlu direview. Namun secara umum, aturan tata kelola bernegara dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia misalnya Indonesia punya cukup modal untuk menjadi negara yang kuat, maju dan berkeadilan. Sungguh aneh dengan modal regulasi yang cukup seperti itu, justru negara seolah-olah takut bila ada tekanan massa yang massif.

Pesan-pesan simbolik yang dikirim Presiden melalui safari kunjungan ke beberapa instansi militer guna memperteguh dirinya sebagai Panglima Tertinggi TNI, seolah tidak berdampak mereduksi jumlah massa yang hendak demo. Bahkan terkesan, setelah aksi demo 0212 yang dikemas acara dua bersama, terasit semakin terkonsolidasi. Ruang gerak mereka tidak lagi terkonsentrasi pada satu titik untuk menunjukkan kekuatan *'show of force'* tetapi semakin terorganisir dengan kekuatan-kekuatan lokal. Aksi lanjutan 1212 disusun secara rapi dalam seruan untuk sholat subuh bersama di masjid-masjid. Tercatat ada 39 daftar masjid yang terlibat dan mengikuti seruan yang dikumandangkan Media Center GNPF-MUI di www.belaguran.com

Apapun strategi penggalangan massa yang disusun dengan beragam kemasan oleh kekuatan rakyat, negara tidak boleh lengah untuk terus mencermati setiap perkembangan yang terjadi. Upaya penangkapan terhadap 9 orang yang disinyalir melakukan perwujudan makarpun, harus dibaca bahwa negara sangat hati-hati melakukan deteksi dini agar eskalasi pengaruh mereka bisa diredam.

Memperteguh Kebhinekaan

Sisa problem tahun ini, yang masih akan terus membayangi adalah masalah kebhinekaan. Nawa Cita kesembilan berbunyi, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga, dianggap masih belum tuntas.

Indonesia adalah rumah bersama beragam subkultur dan etnik harus terus digemakan. Tidak semua penghuni negeri ini paham bahwa ada keragaman di luar kelompok atau komunitas mereka. Bagi yang tidak pernah bergaul dan berinteraksi dengan yang berbeda agama, suku atau budaya seolah-olah negeri ini homogen dan melihat yang lain sebagai 'liyan' yang berbeda. Terlebih mereka terkelompok secara eksklusif dan semakin memelihara sifat fundamentalis, maka sampurnalah bahwa yang benar hanyalah kelompoknya sendiri. Melihat yang lain hanya menumpang atau pihak yang patut dipengaruhi.

Peristiwa pembubaran KKR dalam rangka ibadah Natal di Sabuga Bandung (6/12/16) yang dilakukan ormas yang mengaku sebagai ketua dan anggota PAS (Pembela Ahli Sunnah), contoh mutakhir betapa perbedaan keyakinan selalu dianggap sebagai 'musuh' yang perlu ditiadakan.

Pada saat yang sama anehnya aparat Kepolisian yang seharusnya mencegah terjadinya keributan tersebut justru tidak banyak melakukan pecegahan anggota PAS masuk ke lokasi. Menyusul peristiwa tersebut, PGI kemudian bersurat kepada Kapolri agar kejadian seperti ini kedepan tidak terulang lagi. Polisi dikesankan melakukan pembiaran terhadap pelaksanaan kehendak, pengalangan massa yang pada gilirannya nanti justru akan menjadi ancaman serius untuk perjalanan kemajuan bangsa ini kedepan.

Kekuatiran PGI bila masalah kebhinekaan ini tidak dirawat secara sungguh-sungguh, tidak menuput kemungkinan akan menjadi pemantik distegrasi bangsa yang secara susah payah dibangun.

Jujur harus diakui bahwa proses internalisasi nilai-nilai *Bhineka Tunggal Ika* tidak semudah seratus kata pejabat negara. Juga tidak selalu paralel dengan capaian pendidikan formal seseorang. Semakin terdidik seseorang belum tentu menjamin bahwa secara ideologis dan sosial pandangan-pandangan, sikap dan perilakunya mencerminkan karakteristik nilai-nilai humanisme yang egaliter. Kerap pula mereka juga membentuk dirinya semakin eksklusif. Mengapa? Karena kurangnya pertemuan dan saling interaksi dengan kelompok dari pihak lain yang berbeda. Dialog antar komunitas yang berbeda secara agama atau etnik bukan saja difokuskan kepada kelas atas dan terdidik, tetapi juga mesti melibatkan kalangan akar rumput dengan satu pemahaman bahwa negeri ini adalah milik dan rumah bersama bagi setiap elemen bangsa.

Ironi memang, di tengah upaya keras pemerintah menumbuhkembangkan spirit kebhinekaan, tumbuh subur pula paham-paham radikal yang mengajarkan kekerasan horisontal. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi

ketika aksi mereka menebarkan teror amat militan, tidak dipungkiri ini juga memporak-porandakan konstruksi bangsa toleran menjadi intoleran.

Instrumen aksi pun semakin dikalibrasi dengan situasi kekinian. Ketika masyarakat kita sangat demam media sosial, merekapun ujaran merangsang juga dengan sisipan ajaran-ajaran kebencian yang bisa merenggankan tali persatuan. Nilai-nilai toleran dan saling mengapresiasi yang selalu digaungkan NU dengan Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan Islam Berkeadilan, selalu diusik agar termoda.

Bahkan sangking begitu militannya kelompok radikal ini, pada akhir tahun 2016 juga akan meledakkan sebuah bom rakitan dengan *high explosion* dengan kecepatan 4000 km/jam dan mampu meluluhlantakan seluruh bangunan pada radius 300 meter. Barangkali negeri ini masih dalam perlindungan Tuhan, sebelum meledakkan Istana Merdeka, pengantin (pembawa bom) tersebut berhasil diamankan skuad Densus 88.

Penutup

Tidak berarti setelah kita memahami peta dan kompleksitas masalah keragaman, umat Kristen tinggal diam. Sekali lagi, umat Kristen jika tidak waspada dan mengambil tanggung jawab akan menjadi sasaran empuk mereka yang sudah mendoktrin dirinya sebagai umat Kristen adalah musuh. Ledakan bom di Gereja Ikuweme Samarinda, 13 November 2016 adalah contoh betapa diam saja tidak melakukan aktivitas yang memancing kemarahan publik, dengan mudahnya menjadi target operasi kelompok radikal.

Pesan Paulus kepada Jemaat Korintus agaknya bisa menjadi bekal menghadapi situasi sekarang ini. Katanya, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan (1 Korintus 12:25), juga dipertegas oleh Rasul Petrus, Ia berkata, 'Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah' (1 Petrus 2:1). Umat Kristen dalam keragaman bergereja sesuai dengan konteks keadaannya masing-masing, harus tidak eksklusif.

Tugas menjadi garam dan pelita bukan tugas yang ringan tetapi memerlukan kearifan super agar tidak mejadi sumber fitnah dan kedengkian. Tahun baru, harus kita letakkan dalam spirit bahwa apapun tantangan yang menghadang kita sebagai bangsa, harus menjadi sumber inspirasi harapan dan peluang untuk maju mewujudkan bangsa yang plural tapi tetap bisa maju sejajar dengan bangsa lain.

*Gatut Priyowidodo, Ph.D
Ketua Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP) dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya.